



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V

PENUTUP

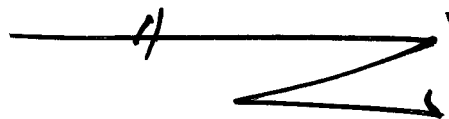
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2021-2026

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Nilai SAKIP Level Maturitas SPIP Tingkat Kapabilitas APIP Indeks Profesionalitas ASN Indeks Maturitas SPBE Indeks Kepuasan Masyarakat	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB Hasil penilaian BPK atas laporan keuangan daerah (UU Nomor 15 Tahun 2004) Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2014 Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai penimbang

MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, BERBUDAYA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Ten tram, dan Tangguh	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk) % Capaian PASBAR MENGAJI Adat, seni dan budaya yang dilestarikan Indeks Pembangunan Gender Predikat Kabupaten Peduli HAM Indeks Pemberdayaan Gender Predikat Kabupaten Layak Anak Indeks Ketahanan Daerah	Jumlah kejadian kejahatan / jumlah penduduk x 10.000 Capaian progam/ target x 100 Adat, seni dan budaya yang dilestarikan Perhitungan Indeks oleh BPS Hasil Penilaian oleh KemenkumHAM Perhitungan Indeks oleh BPS Nilai oleh Kementerian PP-PA Hasil penilaian oleh BPBD
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3} [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Indeks $X(i) = \frac{X(i)_{min}}{X(i)_{maks}}$ Dimana: X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
		<p>Rata-rata lama sekolah</p> <p>Rata-Rata Harapan Lama Sekolah</p> <p>Usia Harapan Hidup</p> <p>Prevalensi Stunting</p> <p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)</p> <p>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> <p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</p> <p>Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu dibagi jumlah anak balita pada waktu yang sama dikali 100%</p> <p>$r = (Pt/Po)^{1/t} - 1$.</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
			Dengan Keterangan : r = Laju Pertumbuhan Penduduk. P_t = Jumlah Penduduk Tahun t . P_0 = Jumlah Penduduk Tahun Awal $t =$ Periode Waktu antara Tahun Awal dan Tahun t .

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, BERDAYA SAING, DAN INKLUSIF

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i
	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Produk domestik bruto periode tertentu dikurang produk domestik bruto periode sebelumnya dibagi produk domestik bruto periode sebelumnya dikali seratus persen
	Persentase Penduduk Miskin		$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
			<p>Dimana:</p> <p>Po = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%
		PDRB per Kapita ADHB (Rp juta)	PDRB dibagi Penduduk Pertengahan Tahun

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sesuai Permen PAN & RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai PP No. 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah

		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100%	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan Persentase rumusan kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100% Jumlah Kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100% Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

2. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Perda yang Ditetapkan Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran tepat Waktu	Jumlah Perda yang disetujui DPRD dibagi Jumlah Ranperda yang Diusulkan Jumlah Dokumen yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah Dokumen DPRD yang dihasilkan	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

3. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3 OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah OPD Yang dicanangkan Sebagai Zona Integritas Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SPIP Level 3 Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SAKIP B Realisasi temuan yang telah ditindaklanjuti dibagi temuan awal dikali 100%	Sekretariat Daerah Inspektorat Inspektorat Inspektorat

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik dibagi Jumlah OPD dikali 100%	Perbup No. 65 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan OPD
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan	Jumlah target kinerja IKU yang tercapai dibagi Jumlah target kinerja pada IKU daerah x 100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	pembangunan Persentase capaian IKU daerah	pelaksanaan pembangunan Persentase capaian IKU daerah		
3	Mewujudkan kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan Akuntabel	Mewujudkan kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB	Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah hasil kelitbangan dalam RPJMD dikali 100%	1. Dokumen RPJMD Kab. Pasaman Barat 2. Dokumen RKPD Kab. Pasaman Barat
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Kategori daerah pada penilaian dan validasi indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Keputusan Menteri Dalam Negeri

5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan efisien	Persetujuan bersama Rancangan Perda tentang APBD tepat waktu /Paling lam 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai	Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bab IV huruf b point 1.a	Bidang Anggaran (BPKD)

6. BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Penataan Bmd sesuai SOP	Jumlah OPD yang menata bBMD sesuai SOP/Total OPD X 100%	Badan Aset dan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah Persentase Realisasi PAD	Jumlah PAD BAPD dibagi PAD Pasaman Barat X 100% Total Realisasi PAD/Target X 100%	Badan Aset dan Pendapatan Daerah Badan Aset dan Pendapatan Daerah

7. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaianb	Total nilai persepsi per Unsur/ total unsur yang terisi x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dmensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatnya kapabilitas ASN	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat PIM/ Total Pejabat Eselon x 100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

8. BADAN KESBANGPOL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol Level Maturitas SPIP Kesbangpol Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan Keuangan Kesbangpol	Hasil Penilaian SAKIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan Oleh Inspektorat Hasil Penilaian Maturitas SPIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan oleh Inspektorat Penurunan temuan BPK atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Inspektorat Inspektorat Inspektorat
2	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Persentase konflik social yang ditangani Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	Jumlah Konflik yang ditangani/ jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun Jumlah diswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideology / jumlah siswa SMP dan SMA Jumlah Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan / jumlah ormas yang terdaftar	Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu / masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih	Badan Kesbangpol

9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1		3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	Persentase rata-rata lama dan harapan sekolah	Persentase rata-rata lama dan harapan sekolah	BPS
2	Meningkatnya nilai adat, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Adat, seni dan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah adat, seni dan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1		3	4	5
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi dengan Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Rumus $AKB = \frac{D 0 - < 1 \text{ th}}{\text{Lahir Hidup}} \times K$	Dinas Kesehatan

		Prevalensi Stunting	Jumlah balita pendek dibagi jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah capaian indikator SPM dibagi jumlah indikator dikali 100%	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHES (%)	Jumlah Rumah Tangga ber-FHBS dibagi Jumlah Seluruh Rumah Tangga dikali 100%	Dinas Kesehatan

1.1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1		3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya RSUD dalam memberikan pelayanan dan meningkatnya Tata kelola RS yang Mandiri dan Akuntabel	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit Cakupan SDM yang memiliki kompetensi	Kepmenkes 129 Tahun 2008 Jumlah SDM yang bekerja didalam sistim kesehatan, baik yang berpendidikan dibidang kesehatan maupun non kesehatan memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya	RSUD Pasaman Barat RSUD Pasaman Barat

12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2 Meningkatnya infrastruktur Publik yang sesuai standar	3 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	4 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan Kabupaten keseluruhan dikali 100%	5 Bidang Bina Marga DPUPR
1		Persentase daerah Irigasi dalam kondisi Baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100%	Bidang PSDA DPUPR
1		Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
1		Rasio tenaga operator/ teknis/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis dibagi jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah kab/kota dikali 100%	Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi DPUPR
2	Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan ruang	Keateatan RTRW Rasio Kepatuhan IMB	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100% Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	Bidang Tata Ruang DPUPR Bidang Cipta Karya DPUPR

		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah yang tertata Bangunan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang tertata bangunan dan lingkungannya dibagi jumlah seluruh bangunan gedung pemerintah dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
3	Pengentasan kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum dibagi jumlah penduduk seluruh nya dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	Jumlah kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah	Bidang Cipta Karya DPUPR

13. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ jumlah masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

			yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni / Jumlah penduduk korban bencana x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase areal kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh / luas Wilayah x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU / Total luasan permukiman x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi / total jumlah pengembang x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penyelesaian izin lokasi (%)	Jumlah Izin Lokasi / Perumahan Izin Lokasi x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi / Jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan x 100		Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Angka Mutlak (Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)		Dinas Perumahan dan Permukiman

14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpol PP dan Kebakaran	Hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat
		Nilai Sakip	Hasil Penilaian Menpan RB	Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil penilaian BPKP	Inspektorat
2	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Urum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keterlibatan, ketertarikan, keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi total pelanggaran K3 x 100	Satpol PP dan Kebakaran
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (W/MK)	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil dan kar tba di tempat kejadian	Satpol PP dan Kebakaran

15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana	Rasio penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi dengan Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dikali 100	BPBD
		Rasio penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100	
		Rasio penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah korban keseluruhan dari bencana dikali 100	BPBD

16. DINAS SOSIAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100 %	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Penanganan Korban bencana alam dan social	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban alam dan social di daerah kabupaten/kota yang	Dinas Sosial

	tanggap darurat bencana daerah kab/kota	membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%	
--	---	---	--

17. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100	Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Fersentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dibagi jumlah pencari kerja keseluruhan dikali 100	Dinas Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Jumlah jiwa tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Jumlah Kasus perselisihan HI yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Dinas Tenaga Kerja

18. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2 Terpenuhi/nya Hak Anak	3 Total Score Pemenuhan Hak Anak (Klaaster 1-5)	4 Penilaian KLA oleh Kementerian	5 DPPKBP3A
2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Kejadian Per 100.000 perempuan Kejadian Per 100 anak	DPPKBP3A DPPKBP3A
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Besar an Anggaran Responsive Gender Terhadap Total Anggaran Belanja Langsung APBD	Total APBD yang melalui GAB dan GBS / total belanja langsung x 100	DPPKBP3A
4	Menurunnya angka Kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	Jumlah Kelahiran pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun/ Jumlah Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	DPPKBP3A
5	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern/ Jumlah PUS usia 15-49 Tahun x 100	DPPKBP3A
6	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Anggota BKB/ Jumlah Keluarga Balita x 100	DPPKBP3A

19. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan utama.	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikali 100 %	Bulog, BPS, DTPHP
		Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi	Peningkatan jaringan kelembagaan distribusi pangan masyarakat melalui Gapoktan	DKTP
	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	Kecamatan yang dipantau harga pangan pokok, kondisi pasokan dan akses terhadap pangan	DKTP
3	Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	PPH adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan	Data Primer, Data Sekunder, BPS
		Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	Realisasi ketersediaan energi dan protein per kapita/hari dibagi target ketersediaan energi dan protein per kapita/hari dikali 100 %	Data Primer, Data Sekunder, BPS, DTPHP, dan Bulog

20. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLLH) DLH Kabupaten Pasaman Barat
2	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Volume sampah yang ditangani dibagi volume produksi sampah dikali 1.00%	Bidang Kebersihan dan Pertamanan

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	% penurunan temuan Nilai SAKIP	Persentase Penurunan temuan yang diperoleh pada Tahun berjalan Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan	Disdukcapi
		Level/Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP yang diperoleh pada tahun berjalan	Disdukcapi
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survey pada tahun berjalan	Disdukcapi

22. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	Persentase status desa mandiri menurut IDM Persentase Desa tertinggal menurut IDM	Jumlah Desa Mandiri pada IDM / Jumlah Desa x 100 Jumlah Nagari Tertinggal / Jumlah Nagari x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukura Adat	% Lembaga Sosial Aktif di Nagari % lembaga Ekonomi aktif di Nagari % Lembaga Adat Aktif di Nagari	Jumlah lembaga social, ekonomi, dan lembaga adat aktif / jumlah total lembaga social, lembaga ekonomi dan lembaga adat x 100	

23. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Persentase layanan angkutan darat Rasio konektivitas kabupaten V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	Jumlah penumpang yang menaikkan angkutan darat Jumlah pembangunan jalan dan jalan yang dilewati oleh angkutan umum Volume jalan yang ada dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

24. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya konektivitas antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100 Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Layanan Publik yang diselenggarakan dikali 100% Jumlah masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya penggunaan data statistik dalam Pengambilan Keputusan	Persentase OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah / Jumlah OPD x 100	Dinas Komunikasi dan Informatika

3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi	Indek KAMI	Tingkatannya pada KAMI	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	--	------------	------------------------	----------------------------------

25. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	Jumlah Usaha Mikro menjadi kecil dibagi jumlah Usaha Mikro dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Sektor perdagangan tahun -n dibagi PDRB total tahun -n dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan	Jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	yang berlakudibagi jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dikali 100%	
4	Meningkatnya IKM, UKM dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Jumlah IKM Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{jumlah IKM tahun } n-1}{\text{Jumlah IKM tahun } n-1} \times 100$ Sektor industri tahun -n dibagi PDRB total tahun -n dikali 100% Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Ynag Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	DPMPTSP
2	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMIDN	Kenakan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMIDN tahun n	DPMPTSP

27. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam organisasi dan ekonomi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota / jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Jumlah perolehan medali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Jumlah perolehan medali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

28. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan pada Instansi pemerintah disemua tingkatan	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur IKM} = \dots \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
---	---	---	---	----------------------------------

29. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan
3	Meningkatnya produksi ikan olahan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan

30. DINAS PARIWISATA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya Tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Lokal dan Nusantara) di destinasi Wisata Pasaman Barat	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sector Pariwisata terhadap PAD	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Retribusi masuk objek wisata, Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Restoram) dibagi jumlah Total PAD Kabupaten Pasaman Barat dikali 100%	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah peningkatan sub sector ekonomi kreatif yang dibinia dibagi total jumlah sub sector ekonomi kreatif dikali 100%	Dinas Pariwisata

31. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	% Peningkatan /Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan	Total produksi tahun ini (ton/Ha) - total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total Produksi tahun ini (Ton/Ha)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

		% Peningkatan / Penurunan produksi komoditas Hortikultura	Total produksi tahun ini (ton/Ha) - total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total produksi tahun ini (Ton/Ha)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
		Produktivitas Padi atau Bahan pangan utama local lainnya	Hasil Ubinan KSA dari BPS	Badan Pudaat Statistik
2	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan / Penurunan populasi Komoditas Ternak	Jumlah ternak tahun sekarang (ekor) - jumlah ternak tahun lalu (ekor) / Jumlah ternak tahun sekarang	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	Hasil Penilaian Menpan RB	Bagian Organisasi
		Level Maturtitas SPIP	Hasil Penilaian Menpan BPKP	Inspektorat
		Jumlah temuan BPK	Hasil penilaian Menpan BPK	BPKD

32. DINAS PERKEBUNAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi komoditi Perkebunan: Kelapa Sawit, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Nilam, Kelapa, Pinang	Produksi tanaman perkebunan pada tahun berjalan	Dinas Perkebunan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai Sakip	Nilai Sakip yang diperoleh pada tahun berjalan (nilai)	Dinas Perkebunan

	2. Level Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP yang diperoleh pada tahun berjalan (level)
	3. % penurunan temuan BPK	% temuan BPK yang diperoleh pada tahun berjalan (%)

33. KECAMATAN KINALI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Kinali
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Kinali

34. KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
---	---	--	--	-------------------------------

35. KECAMATAN TALAMAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Talamau
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Talamau

36. KECAMATAN PASAMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Pasaman

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Pasaman
---	---	--	--	-------------------

37. KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Gunung Tuleh
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Gunung Tuleh

38. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Lembah Melintang

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Lembah Melintang
---	---	--	--	----------------------------

39. KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Ranah Batahan
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Ranah Batahan

40. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sungai Beremas

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sungai Beremas
---	---	--	--	--------------------------

41. KECAMATAN SUNGAI AUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sungai Aur
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sungai Aur

42. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100	Kecamatan Luhak Nan Duo

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100	Kecamatan Luhak Nan Duo
---	---	--	---	-------------------------

43. KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Koto Balingka
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Koto Balingka

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI